

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Walaupun penyusunan anggaran belanja berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tetapi belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan permendagri tersebut khususnya dalam penyusunan anggaran belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi-regulasi yang menunjukkan secara riil dan operasional tentang analisis standar belanja.
2. Dalam proses penyusunan anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kota Kupang yang berkaitan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2012 belum menggunakan analisis standar belanja sebagai pedoman untuk menilai kewajaran antara beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan. Namun, dalam proses penyusunan tersebut menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan standar satuan harga juga merupakan salah satu instrument dalam penganggaran dengan pendekatan kinerja.

B. SARAN

Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggunakan analisis standar belanja agar dalam proses penyusunan anggaran untuk setiap kegiatan dapat dinilai kewajaran biaya dengan beban kerjanya. Dengan demikian maka

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggarannya yang sesuai agar tidak terjadinya pemborosan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF.
- Baswir, 1998. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPF Faisal, Abdulah, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN, Edisi Kedua.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Bunga Rampai, Penerbit UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI Yogyakarta. Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia* Penerbit: Sekolah Pascasarjana UGM
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2010. *Analisis Standar Belanja : Konsep, Metode, Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah*. Penerbit: Sekolah Pascasarjana UGM
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.